

ABSTRACT

Kokoh Community Forum (FMK) is one of PT. Semen Indonesia (SI) efforts to contribute to sustainable development. However, this forum initiates programs that are less relevant to addressing community needs, especially for community empowerment. In reality, FMK was nothing more than a tool for the elite to legitimize their domination over Corporate Social Responsibility (CSR) funds disbursed by SI. That way, program implementation assistance (P2M-SG) is present as agents of change to realize FMK institutions that are more supportive to start empowerment programs.

This study aims to determine institutional changes in FMK institutions, including interactions between actors within structures, as well as the obstacles to implementing institutional changes in order to define final form of FMK institutions. To get an in-depth description of the institutional changes, social-interactive processes carried out between its elements and its implications on FMK institutions, this research uses a qualitative approach, using interviews and observations as data collection instruments.

The findings show that there are two ways to realize FMK institutional change. First, reorganization of FMK human resources, which now involving elements of youth and women, realizes the changes through the dimensions of formations. Second, revitalizing the role of the FMK, which is now only carrying out administrative matters rather than determinative, realizes the changes through the dimensions of functions. However, institutional changes in FMK institutions cannot yet be optimally pursued, and even only carried out partially. In terms of agencies, community assessments that are less holistic lead to ineffective and inefficient communication and coordination efforts. Meanwhile, the structural reaction shown towards institutional change efforts shows resistance because "well-established" social structures consider FMK institutional change as a form of threat to the elite interests. Discourse supported by mutual understanding based on negotiations between actors within structures achieves an institutionalization. The negotiations itself include the distribution of budget realization and the number of program proposals between empowerment and infrastructure. In addition, the existing negotiations also require agents to leave a portion of elite domination that cannot be fully reduced through a period of assistance.

Keywords : institutional transformations, institutional changes, corporate social responsibility, community empowerment

INTISARI

Forum Masyarakat Kokoh (FMK) merupakan salah satu bentuk upaya PT. Semen Indonesia (SI) untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, program-program yang dihasilkan dinilai kurang relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang berdaya. Faktanya FMK tidak lebih dari sekedar wahana bagi para elit untuk melegitimasi dominasi mereka atas dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan oleh SI. Sementara itu, Pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat Semen Gresik (P2M-SG) hadir sebagai salah satu bentuk perubahan untuk mengubah tata kelola FMK yang pro-pemberdayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk perubahan, termasuk interaksi antara aktor dalam struktur, serta hambatan untuk menerapkan perubahan kelembagaan dalam rangka menentukan bentuk akhir kelembagaan FMK. Untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang perubahan kelembagaan, proses sosial-interaktif yang dilakukan antara unsur-unsur kelembagaan dan implikasinya pada lembaga FMK, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan wawancara dan observasi sebagai instrumen pengumpulan data.

Temuan menunjukkan bahwa ada dua cara untuk mewujudkan perubahan kelembagaan FMK. Pertama, reorganisasi sumber daya manusia FMK, yang kini melibatkan unsur pemuda dan perempuan, mewujudkan perubahan melalui dimensi formasi. Kedua, revitalisasi peran FMK, yang kini berfungsi secara administratif daripada determinatif, mewujudkan perubahan melalui dimensi fungsi. Namun, perubahan kelembagaan belum dapat diupayakan secara optimal, dan bahkan hanya dilakukan secara parsial. Dalam konteks agensi, community assessment yang kurang menyeluruh menyebabkan upaya komunikasi dan koordinasi berjalan tidak efektif dan efisien. Sementara itu, reaksi struktural yang ditunjukkan terhadap upaya perubahan menunjukkan resistensi karena struktur sosial yang “telah mapan” menganggap perubahan kelembagaan FMK sebagai bentuk ancaman bagi kepentingan elit. Diskursus yang didukung oleh kesepemahaman berdasarkan negosiasi antara aktor dalam struktur berhasil mencapai sebuah pelembagaan. Negosiasi itu sendiri mencakup distribusi realisasi anggaran dan jumlah proposal program antara pemberdayaan dan infrastruktur. Akan tetapi, negosiasi yang ada juga mengharuskan agen meninggalkan sebagian dominasi elit yang tidak dapat sepenuhnya dikurangi melalui periode pendampingan.

Keywords : transformasi kelembagaan, perubahan kelembagaan, tanggung jawab sosial perusahaan, pemberdayaan masyarakat